

# Hubungan Pilkada Dengan Perencanaan Wilayah

## Di Kec. Siborongborong

**Author:**

Feby Milanie<sup>1</sup>

Asiafinur Mardia<sup>2</sup>

Ayu Kurnia Sari<sup>3</sup>

**Afiliation:**

Universitas Pembangunan Panca

Budi Medan<sup>1,3</sup>

PT.Dinasti Raja Bangun<sup>2</sup>

**Corresponding email**

author email

febymilanie@dosen.pancabudi.ac.id

asia.finur91@gmail.com

ayukurniasari@dosen.pancabudi.ac.id



*This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

**Abstrak:**

Siborongborong merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Tapanuli Utara. Siborongborong merupakan kecamatan yang terdapat bandara internasional dengan nama bandara silangit. Potensi yang ada di kecamatan Siborongborong terbilang besar diantaranya adalah potensi lahan yang subur, domestik pemandangan dan tempat rekreasi yang ada dan di jadikan sebagai nationl geology. Perencanaan wilayah merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam meningkatkan pendapat di wilayah tersebut. Perencanaan wilayah yang baik dapat meningkatkan PAD disuatu daerah tersebut. Pilkada atau pemilihan perangkat daerah bagian yang paling terpenting yang tidak pernah dilewati oleh masyarakat di Siborongborong. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pilkada dengan perencanaan wilayah di kecamatan siborongborong. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dan bersumber dari review jurnal yang di publish. Hasil penelitian ini adalah masyarakat sekitar menyambut antusias yang sangat tinggi dengan adanya kegiatan tersebut pilkada sehingga kepala daerah dapat memajukan wilayahnya. Dari hasil penelitian adanya hubungan pilkada dengan perencanaan wilayah di kecamatan Siborongborong. Hal ini dikarenakan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan antusi agar kepala daerah yang terpilih di dalam pilkada akan merencanakan perencanaan wilayah dan memajukan daerahnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah di Siborongborong. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa semangat dan antusias masyarakat dalam menyambut pilkada ini sangat

luar biasa. Perencanaan wilayah akan dilakukan setiap daerah yang sudah mendapatkan hak sebagai kepala daerah. Hubungan pilkada dengan perencanaan wilayah di Siborongborong sangat erat kaitannya, hal ini dikarenakan dengan adanya pilkada masyarakat sudah menaruh harapan yang besar dengan kepala daerah tersebut untuk memajukan dan merencanakan perkembangan wilayah di masing-masing kelurahan yang ada di kecamatan Siborongborong..

**Kata kunci: Pilkada, perencanaan, wilayah**

---

## **Pendahuluan**

Siborongborong merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Tapanuli Utara. Siborongborong merupakan kecamatan yang terdapat bandara internasional dengan nama bandara silangit. Potensi yang ada di kecamatan Siborongborong terbilang besar diantaranya adalah potensi lahan yang subur, domestik wisata, pemandangan yang indah serta adanya tempat rekreasi yang dijadikan sebagai national geografi. Perencanaan wilayah merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam meningkatkan pendapat di wilayah tersebut. Penduduk kecamatan ini berjumlah 50.641 jiwa (2020), dengan luas wilayah 279, 91 km<sup>2</sup>, dan kepadatan penduduk 181 jiwa/km<sup>2</sup>. Bandar Udara Internasional Silangit, berada di kecamatan ini, yang merupakan pintu masuk terdekat melalui udara ke kawasan wisata Danau Toba. Penduduk kabupaten Tapanuli Utara, pada umumnya merupakan etnis Batak Toba, dan ada juga sebahagian Batak Angkola, Batak Simalungun, dan beberapa pendatang seperti Jawa, Minangkabau, Tionghoa dan Nias Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Tapanuli Utara mencatat bahwa 97,34% penduduk kecamatan Siborongborong memeluk agama Kristen, dimana Protestan 91,66% dan Katolik 5,68%. Kemudian yang memeluk agama Islam berjumlah 2,04%, Buddha 0,13% dan lainnya 0,49%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 155 bangunan gereja Protestan, 12 bangunan gereja Katolik, 1 bangunan masjid dan 1 bangunan mushola. Sedangkan untuk batasan wilayah kecamatan siborongborong terdiri dari sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Lintong Nihuta, Paranginan dan kabupaten Humbang Hasundutan sedangkan batas sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sipoholon, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Pagaran dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sipahutar dan kabupaten Toba.



**Gambar 1.1 Batasan Wilayah Kecamatan Siborongborong**

Pendirian provinsi Tapanui dilakukan sejak belasan tahun yakni tahun 2002. Peraturan pemerintah (PP) yakni PP No 78/2007 dan PP No 129/2008. Berdasarkan hasil keputusan sidang paripurna DPR RI tanggal 19 Desember tahun 2008 dinyatakan memenuhi persyaratan atas keputusan Badan Legislasi di Komisi I DPR RI untuk membentuk provinsi Tapanuli. Kemudian, penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), lalu diresmikan Bandar Udara Silangit yang terletak di Siborongborong sebagai bandara bertaraf Internasional, pembentukan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba oleh presiden Joko Widodo. Maka, perwujudan terbentuk provinsi Tapanuli telah dikemas dalam berita acara dukungan, sesuai dengan PP No 78/2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Sehingga, kecamatan Siborongborong diusulkan menjadi calon ibukota provinsi Tapanuli. Siborongborong merupakan kecamatan yang dapat mengembangkan potensi wilayahnya. Potensi perencanaan wilayah ke arah wisatawan berpeluang cukup besar, hal ini dikarenakan potensi bandara internasional yang terletak di wilayah tersebut. Perencanaan wilayah berpotensi sangat besar, sehingga wilayah tersebut bisa lebih maju dari sebelumnya. Pilkada di daerah Siborongborong sangat ramai dan antusias. Masyarakat sangat berperan aktif dalam mengusulkan suara pada saat proses pemilihan. Terkadang mereka sampai medatangi setiap rumah-rumah di setiap keluarahan di kecamatan siborong-borong. Yale-yale juga disemarakkan agar gelora dari semangat masyarakat juga ikut tercipta. Hal ini sangat mendorong agar pemilihan suara dapat berjalan dengan lancar dan efektif, harapan masyarakat agar pemimpin daerah yang menjadi pilihan mereka dapat dimenangkan dan dapat membawa perubahan serta kearah perencanaan pembangunannya. Penelitian yang dilakukan oleh Florianus Aser (2019) dengan judul penelitian hubungan pilkada serentak dan sinergi perencanaan pembangunan antar pemerintah daerah (konsep perencanaan pembangunan daerah beralih dari logika sektoral menuju logika kewilayahan) menyatakan bahwa Jika dicermati secara mendalam, Suksesi kepemimpinan ditingkat lokal memiliki keterkaitan erat dengan proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka perlu diperhatikan sistem perencanaannya. Sistem perencanaan sesungguhnya harus tersistem dan bersinergi antar daerah dan pusat. Pemahaman ini mengingat implementasi visi dan misi serta janji politik kepala daerah yang terpilih akan diwujudkan secara berjenjang dalam jangka pendek dan

jangka menengah. Hal tersebut akan dituangkan dalam rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan pilkada serentak merupakan momentum untuk mewujudkan perencanaan yang bersinergi. Namun yang harus diperhatikan adalah konsistensi pelaksanaannya dan tidak dipengaruhi oleh dominasi politik rezim yang berkuasa. dengan adanya pilkada serentak maka ada kesamaan waktu dalam proses perencanaan pembangunannya sehingga hal itu bisa disesuaikan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, termasuk antar daerah dengan propinsi maupun pusat. Perubahan Paradigma Perencanaan Pembangunan Berdasarkan pemahaman perencanaan pembangunan suatu negara sejalan dengan bentuk negaranya, maka argumentasi ini juga menjadi landasan melihat perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks itu bentuk negara Indonesia adalah unitaris, sehingga sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikembangkan selalu didominasi oleh peran pemerintah pusat, meskipun dominasinya bergradasi dari waktu ke waktu. Seiring dengan dinamika sosial politik yang berkembang di tingkat lokal dan nasional maka terjadi perubahan pada sistem ketatanegaraan dan model penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal tersebut berdampak pada perubahan kebijakan dan juga penyesuaian lainnya termasuk fundamental dalam konstitusi. Sesuai perintah konstitusi agar diselenggarakan otonomi yang seluas-luasnya, oleh karena itu model perencanaan pembangunan pun sudah sewajarnya perlu dirintis pemikiran untuk menyelaraskan dengan sistem pemerintahan yang desentralistik. Perubahan paradigma yang dimaksud adalah dari perencanaan sektoral ke perencanaan kewilayahan. Perencanaan sektoral yang selama ini dikembangkan menghasilkan ego-sektoral dan tidak memperhatikan pembangunan yang berkesinambungan. Setiap bidang memiliki program sendiri-sendiri merencanakan pembangunan yang digulirkan sampai kepelosok dengan kepentingannya yang berbeda. Oleh karena itu sudah saatnya dipikirkan alternatif perencanaan dengan model kewilayahan yang sesuai dengan sistem pemerintahan desentralistik yang dikembangkan. Paradigma kewilayahan (regionalism) sebenarnya bukan sesuatu yang baru di negara lain, tetapi menjadi hal baru untuk digagas dan diterapkan di Indonesia. Namun melihat keberhasilan model ini pada implementasi di negara lain maka sudah saatnya dipikirkan dan dikembangkan di Indonesia. Semangat ini membutuhkan kemauan politik dari semua stakeholders bangsa dari pusat sampai daerah. Hal ini dapat terjadi manakala kepentingan politik pragmatis dari rezim maupun partai politik yang berkuasa dikurangi.

## **2. STUDI LITERATURE REVIEW**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Florianus Aser (2019) dengan judul penelitian hubungan pilkada serentak dan sinergi perencanaan pembangunan antar pemerintah daerah (konsep perencanaan pembangunan daerah beralih dari logika sektoral menuju logika kewilayahan) menyatakan bahwa Jika dicermati secara mendalam, Sukses kepemimpinan ditingkat lokal memiliki keterkaitan erat dengan proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka perlu diperhatikan sistem perencanaannya. Sistem perencanaan sesungguhnya harus tersistem dan bersinergi antar daerah dan pusat.

---

Pemahaman ini mengingat implementasi visi dan misi serta janji politik kepala daerah yang terpilih akan diwujudkan secara berjenjang dalam jangka pendek dan jangka menengah. Hal tersebut akan dituangkan dalam rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan pilkada serentak merupakan momentum untuk mewujudkan perencanaan yang bersinergi. Namun yang harus diperhatikan adalah konsistensi pelaksanaannya dan tidak dipengaruhi oleh dominasi politik rezim yang berkuasa. dengan adanya pilkada serentak maka ada kesamaan waktu dalam proses perencanaan pembangunannya sehingga hal itu bisa disesuaikan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, termasuk antar daerah dengan propinsi maupun pusat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Tempat penelitian ini dilakukan di Siborongborong. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dan bersumber dari review jurnal yang di publish. Hasil penelitian ini adalah masyarakat sekitar menyambut antusias yang sangat tinggi dengan adanya kegiatan tersebut pilkada sehingga kepala daerah dapat memajukan wilayahnya.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pilkada yang dilakukan di Siborongborong disambut dengan sangat antusias dan disambut oleh seluruh masyarakat di kecamatan Siborongborong. Kepala daerah juga berperan penting meningkatkan aspirasi masyarakat dengan melakukan perencanaan wilayah yang kedepannya dapat memajukan daerah di kecamatan Siborongborong. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Florianus Aser (2019) dengan judul penelitian hubungan pilkada serentak dan sinergi perencanaan pembangunan antar pemerintah daerah (konsep perencanaan pembangunan daerah beralih dari logika sektoral menuju logika kewilayahan) menyatakan bahwa Jika dicermati secara mendalam, Sukses kepemimpinan ditingkat lokal memiliki keterkaitan erat dengan proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka perlu diperhatikan sistem perencanaannya. Sistem perencanaan sesungguhnya harus tersistem dan bersinergi antar daerah dan pusat. Pemahaman ini mengingat implementasi visi dan misi serta janji politik kepala daerah yang terpilih akan diwujudkan secara berjenjang dalam jangka pendek dan jangka menengah. Hal tersebut akan dituangkan dalam rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan pilkada serentak merupakan momentum untuk mewujudkan perencanaan yang bersinergi. Namun yang harus diperhatikan adalah konsistensi pelaksanaannya dan tidak dipengaruhi oleh dominasi politik rezim yang berkuasa. dengan adanya pilkada serentak maka ada kesamaan waktu dalam proses perencanaan pembangunannya sehingga hal itu bisa disesuaikan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, termasuk antar daerah dengan propinsi maupun pusat.

### **5. KESIMPULAN**

1. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa semangat dan antusias masyarakat dalam menyambut pilkada ini sangat luar biasa.
2. Perencanaan wilayah akan dilakukan setiap daerah yang sudah mendapatkan hak sebagai kepala daerah.
3. Hubungan pilkada dengan perencanaan wilayah di Siborongborong sangat erat kaitannya, hal ini dikarenakan dengan adanya pilkada masyarakat sudah menaruh harapan yang besar dengan kepala daerah tersebut untuk memajukan dan merencanakan perkembangan wilayah di masing-masing kelurahan yang ada di kecamatan Siborongborong.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aser, Florianus. (2016) "HUBUNGAN PILKADA SERENTAK DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH (Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Beralih dari Logika Sektoral Menuju Logika Kewilayahan)." *Jurnal Politikologi* 19-26.
- Hakim, Lukman. (2010)."Implikasi Pilkada Langsung terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah." *Jurnal Konstitusi* 3.1
- Hermanto, Zarida, and Joko Suryanto. (2016)."Pilkada dan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar Pemerintah daerah: Peran Gubernur yang Nyata tapi Tak Kentara." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 8.2
- Muhammad, N. A., & Hendra, H. (2022). Perencanaan Kampanye Syafrudin-Subadri dalam Kontestasi Pilkada Kota Serang tahun 2018. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(2), 1-15.
- Muhammad, N. A., & Hendra, H. (2022). Perencanaan Kampanye Syafrudin-Subadri dalam Kontestasi Pilkada Kota Serang tahun 2018. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(2), 1-15.